

ANALISIS KONSEP KAMPUS MERDEKA DALAM PERSPEKTIF ALIRAN FILSAFAT PENDIDIKAN PROGRESIVISME DAN PERENIALISME

Agil Nanggala

Mahasiswa Program Studi PKn SPs UPI

E-mail: agilnanggala@upi.edu

Karim Suryadi

Dosen Program Studi PKn SPs UPI

E-mail: karimsuryadi@upi.edu

Abstrak

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi kampus merdeka dalam perspektif aliran filsafat pendidikan progresivisme dan perenialisme. Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Proses analisis data dalam penelitian ini meliputi: reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah 1) kebijakan kampus merdeka begitu merepresentasikan filsafat pendidikan progresivisme, karena menghendaki adanya modernisasi dan demokratisasi, guna mewujudkan kemerdekaan atau kebebasan dalam pendidikan, dalam konteks orientasi pendidikan dan pembelajarannya, kampus merdeka memiliki keselarasan dengan filsafat pendidikan progresivisme, karena berfokus pada upaya mentransformasikan berbagai keterampilan, disiplin ilmu, kepekaan sosial dan kepribadian, kepada mahasiswa 2) kebijakan kampus merdeka, dalam konteks aliran filsafat pendidikan perenialisme, tidak begitu memiliki relevansi yang substansial, karena perenialisme berbanding terbalik dengan progresivisme, orientasi kampus merdeka untuk membentuk kepribadian mahasiswa, tentu masih memiliki relevansi dengan filsafat pendidikan perenialisme, walau bukan menjadi landasan utamanya, tetapi filsafat perenialisme memberikan refleksi mengenai pentingnya menjaga substansi pendidikan agar tetap selaras dengan kebudayaan, termasuk pada era modern.

Kata Kunci: Kampus Merdeka, Progresivisme, Perenialisme.

Abstract

The purpose of carrying out this research is to determine the substance of an independent campus in the perspective of progressivism and perennialism educational philosophy. This research was conducted through a qualitative approach with a literature study method. The data analysis process in this research includes: data reduction, data display, verification and drawing conclusions. The results of the research of this is 1) a policy campus independent so represents the philosophy of educational progressivism, because it requires the modernization and democratization, in order to realize the independence or freedom in education, in the context of the orientation of education and learning, campus independence has alignment with the

philosophy of educational progressivism, because it focuses on efforts to transform a variety of skills, the discipline of science, sensitivity social and personality, the students 2) policies campus independent, in the context of the flow of the philosophy of education perennialisme, not so has the relevance that substantial, because perennialisme inversely inversely with progressivism, the orientation of the campus free to shape the personality of the students, of course still have relevance to the philosophy of education perennialisme, though not become a cornerstone of its main, but the philosophy perennialisme give reflection on the importance of maintaining the substance of education in order to stay in tune with the culture, including the modern era.

Keywords: *Independent Campus, Progressivism, Perennialism.*

Latar Belakang

Kampus Merdeka merupakan kebijakan pendidikan baru yang diberlakukan oleh Menteri Nadiem Makarim pada jenjang pendidikan Tinggi. Pada umumnya tujuan diberlakukannya kampus merdeka yaitu, memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi, untuk mempermudah birokrasi, khususnya pada proses akreditasi, akselerasi perguruan tinggi agar cepat memperoleh status PTN-BH, juga kewenangan dalam membuka program studi baru. Termasuk kepada mahasiswa, yang diakomodir haknya, *pertama* untuk melaksanakan perkuliahan di luar program studinya, maksimal 3 semester, *kedua* melakukan pembelajaran langsung di masyarakat, guna memberdayakan mahasiswa. Freire (dalam Prahani, dkk, hlm. 31) menegaskan pentingnya kebebasan dalam pendidikan, agar peserta didik tidak dianggap sebagai wadah kosong, sehingga harus diisi sampai penuh, seperti metode menabung di bank, yang menghambat kreatifitas mereka.

Dijelaskan melalui Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020) bahwa tataran praksis, dari konsep kampus merdeka, yaitu 1) pertukaran pelajar, 2) praktik kerja, 3) asistensi mengajar pada satuan pendidikan, 4) penelitian, 5) proyek kemanusiaan, 6) kegiatan wirausaha, 7) proyek independen, dan 8) KKN tematik atau membangun desa. Bentuk pembelajaran tersebut, merupakan respons terhadap kemajuan zaman, yang membutuhkan berbagai keterampilan. Khususnya pada bentuk pembelajaran berupa magang, perlu dianalisis kembali, relevansinya dengan tujuan pendidikan nasional, atau diberikan indikator yang jelas agar tidak menjadi liberalisasi pendidikan di Indonesia secara praksis. Realitas tersebut merupakan langkah untuk memenuhi hak-hak mahasiswa, pada kampus merdeka, yang perlu mengarah pada upaya memberikan pelayanan secara optimal bagi mahasiswa, secara kebijakan maupun praktik.

Dimasukkannya data dan informasi mengenai pendidikan dalam penelitian ini, bertujuan untuk memberikan fakta objektif mengenai keadaan pendidikan tinggi di Indonesia. Sehingga menjadi rasionalisasi logis untuk melakukan analisis dan refleksi, mengenai ketimpangan antara cita-cita dari pendidikan tinggi dan realitasnya di Indonesia. Tentu banyaknya perguruan tinggi di Indonesia, perlu dioptimalkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, agar secara partisipatif, efektif dan menyeluruh mampu menyelesaikan permasalahan bangsa Indonesia yang semakin dinamis dan kompleks. Nanggala dan Suryadi (2020, hlm. 11) memaparkan diberlakukannya kampus merdeka merupakan respons dari kebutuhan pada era modern ini, serta merupakan bentuk

aktual dalam kebijakan pendidikan tinggi, guna mengoptimalkan eksistensi dari perguruan tinggi, sehingga kesenjangan pada aspek kualitas serta pemerataannya bisa teratasi. Merujuk data statistik yang dikeluarkan Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti (2019) menjelaskan bahwa:

1. Sebanyak 2.175 belum terakreditasi (48%)
2. Terakreditasi C sebanyak 1.457 (32%)
3. Terakreditasi B sebanyak 831 (18%)
4. Terakreditasi A sebanyak 95 (2%)
5. Jumlah Pendidikan Tinggi berdasarkan kelompok:
 - a) Perguruan Tinggi Agama: 1.129 (26%)
 - b) Perguruan Tinggi Kedinasan: 178 (4%)
 - c) Perguruan Tinggi Negeri: 122 (2%)
 - d) Perguruan Tinggi Swasta: 3.129 (68%)
6. Baru sebanyak 11 Perguruan Tinggi berstatus PTN BH.

Kebijakan kampus merdeka begitu dipengaruhi oleh filsafat pendidikan progresivisme, yang menekankan pentingnya kemajuan dalam bidang pendidikan. Dewey (dalam Mustaghfiroh, 2020) menjelaskan bahwa progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menghendaki kemajuan pendidikan, sehingga berkualitas dan modern serta memberikan manfaat yang nyata bagi peserta didik dalam menghadapi perkembangan zaman, guna mengembangkan kapasitas peserta didik, berdasarkan minat dan bakat mereka. Progresivisme menjadi kebutuhan dalam perencanaan kebijakan pendidikan dan implementasinya, karena realitas kemajuan iptek saat ini. Tentu progresivisme memperbesar peluang terjadinya demokratisasi pada bidang pendidikan, karena menekankan pelibatan semua pihak dalam memajukan pendidikan bangsa.

Boleh jadi, progresivisme pendidikan akan mengarah pada liberalisasi pendidikan, karena pada praksisnya, swasta diberikan kesempatan dalam mengelola pendidikan, melalui badan hukum. Ditegaskan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, bahwa pendidikan tinggi Indonesia bersifat nirlaba, agar pendidikan tetap pada substansinya juga melindungi hak-hak warga negara, agar bisa mengenyam pendidikan tinggi. Realitas kemajuan zaman saat ini, membuat upaya peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan di Indonesia, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Tetapi dengan seluruh pihak yang ada dimasyarakat, agar bersifat efektif dan menyeluruh, guna mewujudkan bangsa Indonesia yang cerdas.

Faktanya kemerdekaan pada bidang pendidikan tinggi, tidak selalu berpengaruh pada hilangnya pembelajaran dan kegiatan formal untuk menginternalisasikan nilai dan moral atau mentransformasikan karakter terpuji kepada mahasiswa. Penting dalam menjaga identitas bangsa sebagai pondasi pendidikan, khususnya pada era modern saat ini, sebagai upaya mewujudkan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Langkah strategisnya adalah, bangsa Indonesia perlu memandang bahwa untuk memajukan pendidikan bangsa, tidak harus meninggalkan kebudayaan, tetapi idealnya perlu melakukan kolaborasi antara kemajuan zaman serta kebudayaan bangsa Indonesia, sehingga konsep dan praksis pendidikan di Indonesia bersifat komprehensif. Biah (2014, hlm. 43) mengungkapkan modernisasi pada bidang pendidikan, tidak

harus meninggalkan kebudayaan bangsa, tetapi idealnya realitas kemajuan pendidikan perlu dikolaborasikan dengan kebudayaan, yang merepresentasikan identitas bangsa Indonesia.

Dijelaskan melalui Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020) bahwa salah satu tujuan diberlakukannya kebijakan kampus merdeka adalah untuk membentuk kepribadian mahasiswa, agar pancasilais. Tentu realitas tujuan pendidikan yang berfokus pada pembentukan karakter atau kepribadian peserta didik merupakan orientasi dari aliran filsafat perenialisme. Nyatanya aliran filsafat tersebut, begitu menekankan pentingnya transformasi nilai dan kebudayaan yang eksis sejak dahulu dimasyarakat kepada peserta didik melalui proses pendidikan. Hutchins (dalam Siregar, 2016, hlm. 177) menjelaskan pendidikan mengimplikasikan pengajaran, pengajaran mengimplikasikan pengetahuan lalu menjadi kebenaran, kebenaran di mana pun dan kapan pun adalah sama, sehingga pendidikan harus membantu peserta didik dalam memperoleh serta mengaplikasikan kebenaran abadi.

Melalui realitas tersebut, diketahui bahwa kebijakan kampus merdeka, walau begitu dipengaruhi oleh filsafat pendidikan progresivisme, tetapi tidak menghilangkan substansi mengenai pentingnya membentuk kepribadian mahasiswa, yang merupakan orientasi dari filsafat perenialisme. Sebagai bangsa yang berkarakter, tentu Indonesia tidak boleh melupakan pentingnya identitas nasional dalam pendidikan, baik pada aspek kebijakannya maupun pada aspek praksisnya. Karena berkaitan langsung dengan upaya membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter, berdaya saing dan unggul. Sehingga, idealnya bangsa Indonesia perlu memiliki strategi untuk mewujudkan tujuan tersebut, yang diejawantahkan melalui peta jalan pendidikan nasional, khususnya pada kebijakan pendidikan tinggi.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan kampus merdeka dalam perspektif aliran filsafat pendidikan progresivisme?
2. Bagaimana kebijakan kampus merdeka dalam perspektif aliran filsafat pendidikan perenialisme?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep kampus merdeka dalam perspektif aliran filsafat pendidikan progresivisme dan perenialisme. Tentu kampus merdeka merupakan bentuk kebijakan pendidikan tinggi, yang bersifat progresif, karena adaptif terhadap kemajuan zaman, tetapi tidak selalu harus melupakan nilai, moral serta karakter dalam proses pendidikan dan pembelajarannya. Sehingga orientasi penelitian ini juga, memberikan penegasan ringkas mengenai pentingnya menjaga substansi kebudayaan dalam pendidikan, yang menjadi identitas nasional, khususnya pada realitas modernisasi, demokratisasi dan kemerdekaan pada bidang pendidikan tinggi, agar semakin optimal dan komprehensif.

Realitas penelitian kualitatif yang bersifat mendalam dan elaboratif, menjadi rasionalisasi peneliti, untuk menggunakan pendekatan tersebut pada penelitian kampus merdeka ini. Sumber

literatur pada penelitian ini umumnya terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer serta sekunder. Sumber primer berfokus pada jurnal ilmiah, karena memiliki keabsahan yang tinggi, dan sumber sekunder difokuskan pada dokumen resmi negara, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan yang sifatnya konseptual. Teknik analisis data dalam penelitian kampus merdeka ini, menggunakan teknik dari Miles dan Huberman (1992) yang mengungkapkan bahwa teknik analisis data kualitatif, yang pada prosedurnya yaitu: reduksi data, display data, verifikasi serta penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Bagaimana kebijakan kampus merdeka dalam perspektif aliran filsafat pendidikan progresivisme?

Progresivisme menghendaki adanya kemajuan dalam bidang pendidikan, melalui adaptasi terhadap realitas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tidak hanya orientasi tersebut, progresivisme juga menjadikan keterampilan serta kreatifitas peserta didik, sebagai orientasi utama dari proses pembelajaran. Karena progresivisme menganggap peserta didik memiliki modal akademik dalam menyelesaikan berbagai problematik pribadinya. Tentu pada praksis pembelajarannya, progresivisme menjadikan peserta didik atau mahasiswa, sebagai aktor utama, sehingga peran pendidik terbatas sebagai mediator atau fasilitator.

Tentu modernisasi yang terjadi saat ini tidak bisa dihindari lagi, termasuk pada bidang pendidikan, baik pada ranah konsep maupun ranah praksisnya yang harus adaptif terhadap realitas tersebut. Dengan orientasi terjadinya demokratisasi dan kolaborasi pada bidang pendidikan, sehingga bersifat efektif, berkualitas dan partisipatif. Tidak terbatas pada karakteristik kebijakan pendidikan yang berkualitas dan modern. Tetapi juga menjadi landasan kuat dalam upaya memprioritaskan pemenuhan hak-hak peserta didik atau mahasiswa, serta pelayanan optimal kepada mereka.

Termasuk realitas diberlakukannya kebijakan kampus merdeka pada pendidikan tinggi, yang begitu merepresentasikan filsafat progresivisme, menjadi bentuk aktualisasi pendidikan tinggi, karena merupakan respons dari berbagai kebutuhan dan masalah pada era modern ini. Pendidikan tinggi menjadi jenjang pendidikan yang strategis dalam mengelola bonus demografi, karena warga negara yang mengenyam pendidikan tinggi, pada umumnya, merupakan usia produktif, yang memiliki sifat kreatif, inovatif serta kritis. Tentu realitas tersebut, merupakan rasionalisasi logis dalam memberlakukan kebijakan kampus merdeka untuk pendidikan tinggi, sehingga minat, bakat, orientasi serta pelayanan kepada mahasiswa bisa terpenuhi. Liberalisasi pendidikan tinggi, berpengaruh pada meningkatnya kualitas pembelajaran dan pelayanan kepada mahasiswa (Nabaasa, 2019, hlm. 107).

Dalam Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020) dijelaskan, bahwa tujuan umum dari kebijakan kampus merdeka pada perguruan tinggi adalah untuk menguasai disiplin ilmu dan berbagai keterampilan agar bermanfaat pada masa yang akan datang. Tentu realitas tujuan tersebut, begitu merepresentasikan orientasi dari pendidikan yang progresif, karena sangat menekankan pentingnya kebermanfaatannya berupa hasil dari proses pendidikan, secara nyata

(pragmatis). Bukan tanpa sebab, realitas demokratisasi serta modernisasi yang terjadi pada berbagai aspek kehidupan manusia, mengakibatkan persaingan semakin terbuka dan kompetitif. Wulandari (2020, hlm. 4) menjelaskan bahwa progresivisme berfokus dalam melaksanakan pembelajaran yang berdampak nyata bagi peserta didik, sehingga bermanfaat, baik bagi dirinya sendiri, maupun orang lain.

Boleh jadi progresivisme pada bidang pendidikan tinggi, secara praksis melahirkan dampak negatif dari liberalisasi pendidikan tinggi, apabila tidak disertai integritas dan moralitas pemangku kebijakan, sebagai pejabat struktural maupun fungsional. Tidak bisa dimungkiri, awal Indonesia mengenal konsep liberalisasi pada bidang pendidikan yaitu pada tahun 1995. Indonesia meratifikasi perjanjian multilateral *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), dalam perjanjian tersebut mengatur mengenai perdagangan barang dan jasa, khusus mengenai jasa, yang di dalamnya terdapat jasa pendidikan, diatur lebih lanjut melalui GATS atau *General Agreement on Trade in Services* (Ramadhan, dkk, 2019, hlm. 427). Tentu dampak negatif dari diberlakukannya kesepakatan mengenai liberalisasi pada pendidikan tinggi, yaitu kecilnya peluang generasi muda yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi, sehingga perlunya perlindungan hukum dan kesiapan pemerintah, berupa bantuan pendidikan, sebagai solusi efektif guna meminimalisir dampak negatif tersebut.

Eksistensi dari liberalisasi pendidikan di Indonesia, pernah melahirkan landasan yuridis pendidikan, yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan, yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada realitasnya Undang-Undang tersebut, memang menimbulkan perdebatan yang begitu panjang, mayoritas masyarakat menganggap bahwa Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan, pada praktiknya memberikan garis demarkasi, yang melarang anak kurang mampu untuk mendapatkan kesempatan mengenyam bangku perkuliahan di perguruan tinggi, karena biaya mahal (Wahid, 2010, hln, 140). Realitas tersebut menegaskan bahwa terdapat batasan dari liberalisasi pendidikan di Indonesia, baik secara konsep maupun praktik. Terutama yang berkaitan dengan persamaan hak dalam pendidikan, persamaan kesempatan untuk masuk perguruan tinggi negeri, tersedianya bantuan pendidikan, serta biaya pendidikan yang murah.

Idealnya aliran filsafat progresivisme, perlu dioptimalkan sebaik dan sebijaksana mungkin, dalam memperbaiki kualitas serta pemerataan pendidikan bangsa, mewujudkan modernisasi dan demokratisasi pendidikan, bahkan mengorientasikan mahasiswa sebagai tujuan utama pendidikannya. Sehingga tidak bijak apabila aliran progresivisme, dijadikan landasan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk memanfaatkan pendidikan, agar menjadi sumber keoportunitasnya, karena sangat tidak sesuai dengan berbagai prinsip pendidikan. Aliran Progresivisme memiliki orientasi untuk mewujudkan kemerdekaan atau kebebasan dalam pendidikan, sehingga terjadinya pemerataan kualitas pendidikan dan persaingan yang sehat, khususnya pada satuan pendidikan tinggi. Liberalisasi pada pendidikan tinggi memberikan peluang lebih bagi setiap perguruan tinggi, untuk bersaing menjadi yang terbaik, seperti pada

negara Malaysia yang menuntut perguruan tinggi untuk bersaing dalam layanan pendidikan dan kompetensi lulusannya (Taylor, 2016, hlm. 22).

Dijelaskan melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa setiap perguruan tinggi, memiliki otonomi untuk menyusun kurikulumnya sendiri. Faktanya kewenangan tersebut begitu merepresentasikan filsafat pendidikan progresivisme, yang memberikan kewenangan penyusunan kurikulum kepada program studi, untuk mengatasi dinamis dan kompleksnya tantangan zaman secara cepat dan akurat. Termasuk substansi pembelajaran pada kampus merdeka, yang dijelaskan oleh Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus merdeka bahwa pembelajaran pada kampus merdeka yaitu: 1) pertukaran pelajar, 2) praktik kerja, 3) asistensi mengajar pada satuan pendidikan, 4) penelitian, 5) proyek kemanusiaan, 6) kewirausahaan, 7) proyek independen, dan 8) KKN tematik atau membangun desa, tentu tujuan pembelajaran tersebut, menegaskan pembelajaran kampus merdeka bersifat eksploratif, kontekstual dan utamanya berfokus pada upaya memperkuat keterampilan mahasiswa. Progresivisme memandang bahwa kurikulum pendidikan tidak terbatas pada pembelajaran berbasis mata pelajaran saja, tetapi harus didasari oleh kebutuhan peserta didik, pembelajarannya harus bersifat aktif, eksploratif, kontekstual dan menyenangkan dan dinamis agar kreatifitas dan daya peserta didik tumbuh (Oinstein dan Levine dalam Faris, 2015, hlm. 321).

Orientasi pendidikan dan pembelajaran yang digagas oleh aliran filsafat progresivisme, adalah memberikan manfaat sebaik mungkin, kepada peserta didik atau mahasiswa, melalui pengoptimalan minat dan bakat mereka. Tentu manfaat dari proses pendidikan dan pembelajaran yang dimaksud, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk dunia sosial, sehingga keberadaan dari mereka, memiliki andil penting dalam terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Tentu progresivisme begitu menekankan pentingnya menguasai berbagai keahlian atau keterampilan yang berguna (pragmatis) bagi peserta didik atau mahasiswa untuk berkarier kelak nanti. Progresivisme memandang bahwa tujuan pendidikan harus didasarkan pada masa depan, melalui pengoptimalan minat dan bakat peserta didik, agar menjadi modal pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah yang dinamis dan kompleks, baik masalah sendiri, maupun sosial (Ibrahim, 2018, hlm. 163).

Pada realitas pembelajarannya, aliran filsafat progresivisme, berfokus kepada peserta didik atau mahasiswa, sehingga mereka memiliki peran penting, dalam mewujudkan pembelajaran yang demokratis. Bukan tanpa sebab, orientasi pembelajaran pada aliran filsafat progresivisme, yang berupaya membentuk daya kritis dan kreatifitas peserta didik dan mahasiswa, membuat mereka memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran. Peran pendidik dalam progresivisme, hanya terbatas sebagai mediator dan fasilitator, untuk membantu peserta didik menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya. Abdullah (2017, hlm. 52) mengungkapkan praksis pembelajaran progresivisme berfokus pada peserta didik, tugas pendidik adalah pembimbing, mediator dan fasilitator, dalam progresivisme, peserta didik diajarkan nilai-nilai personal dan sosial.

Kampus Merdeka begitu kuat landasan progresivismenya, karena menghendaki terjadinya kemerdekaan, modernisasi dan demokratisasi pendidikan. Tentu orientasi tersebut, perlu didukung dan diawasi oleh semua pihak, agar meminimalisir terjadinya dampak negatif dari liberalisasi

pendidikan di Indonesia secara praktik. Tidak bisa dimungkiri, dampak negatif tersebut, membuat kesempatan mengenyam pendidikan tinggi, upaya pemenuhan hak-hak mahasiswa, menjadi tidak optimal, sehingga melahirkan ketidakadilan. Idealnya realitas progresivisme pendidikan tinggi pada bangsa Indonesia, baik pada aspek konsep, kebijakan maupun praksisnya, harus menjadi kesempatan dalam memajukan pendidikan bangsa, bahkan membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter, berdaya saing dan unggul.

2. Bagaimana kebijakan kampus merdeka dalam perspektif aliran filsafat pendidikan perenialisme?

Sebagai aliran filsafat pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kebudayaan zaman dulu, tentu perenialisme bersifat konservatif. Faktanya filsafat pendidikan perenialisme memiliki orientasi dalam membantu peserta didik untuk menemukan dan menerapkan kebenaran yang paling hakiki. Tentu kebenaran yang paling hakiki, tidak pernah berubah, karena sifatnya konsisten, dalam keadaan bagaimana pun. Dalam konteks pembelajarannya, perenialisme begitu didasari oleh nilai, etika, moral, kebudayaan dan pengetahuan yang hidup dimasyarakat.

Aliran filsafat perenialisme merupakan respons sekaligus solusi terhadap progresivisme, perenialisme bersifat konservatif, karena meyakini nilai-nilai, kebudayaan atau prinsip umum pada zaman kuno dan abad pertengahan, merupakan dasar pendidikan yang kuat dan kokoh (Habsari, 2013, hlm. 149). Tentu filsafat perenialisme begitu relevan untuk diterapkan menjadi kurikulum pendidikan bangsa yang menganut paham tradisional dan konservatif, karena meyakini nilai-nilai dan kebudayaan yang hidup dimasyarakat, merupakan modal sosial dalam membawa bangsa menuju puncak peradabannya. Tetapi pada realitasnya, pada era globalisasi dan modernisasi yang terjadi saat ini, tidak ada bangsa yang mampu hidup sendiri, sehingga melahirkan konsep kerja sama internasional, termasuk pada ranah pendidikan, yang tidak merusak identitas nasional bangsa terkait. Nainggolan (2017, hlm. 6) menjelaskan setelah DPR mengesahkan Perjanjian Damai dan Pampasan Perang antara Indonesia dengan Jepang pada Maret 1958, Indonesia resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Jepang sejak April 1958, sampai saat ini, Jepang telah menjadi mitra kerja sama terbesar Indonesia, termasuk pada bidang pendidikan.

Pancasila merepresentasikan nilai, keadaban, etika dan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, realitas tersebut, tentu berpengaruh terhadap tujuan pendidikan nasional Indonesia. Dijelaskan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan eksplisit yang berfokus pada penguatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, membentuk akhlak mulia peserta didik, tentu merepresentasikan aliran filsafat pendidikan perenialisme, memiliki andil dalam menyusun dan mengesahkan tujuan pendidikan nasional. Nuryamin (2019, hlm. 59) menjelaskan perenialisme memberikan solusi alternatif, dalam memfokuskan tujuan pendidikan terhadap penguatan spiritual peserta didik.

Dalam konsteks kebijakan kampus merdeka, dijelaskan melalui Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020) bahwa salah satu tujuan eksplisit dari diberlakukannya kebijakan tersebut adalah membentuk kepribadian mahasiswa. Nyatanya realitas tersebut menegaskan bahwa filsafat perenialisme eksis dalam kebijakan kampus merdeka, walau pengaruhnya tidak sebesar dan sekomprensif filsafat progresivisme. Idealnya mahasiswa yang cerdas dan terampil, perlu didukung oleh karakter yang kuat, agar meminimalisir timbulnya kerugian, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat umum, seperti perilaku korupsi, tentu liberalisasi pendidikan perlu dibatasi, agar tersedianya kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan, dan menghindari terjadinya komersialisasi pendidikan. Liberalisasi pendidikan tinggi, pada dampak negatifnya adalah mengakibatkan satuan pendidikan tinggi memandang pendidikan sebagai sumber bisnis daripada sebagai lembaga yang berfokus pada kegiatan pendidikan dan penelitian (Bhowmick, 2016, hlm. 86).

Modernisasi pendidikan terjadi, karena adatif terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tidak perlu meninggalkan identitas bangsa, yang menjadi kekuatan dan ketahanan nasional. Menjaga kebudayaan luhur bangsa menjadi keharusan, khususnya pada era globalisasi saat ini. Bagaimana pun realitasnya, pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan kebudayaan, karena salah satu tujuan dari pendidikan, adalah melestarikan kebudayaan bangsa, karena merupakan modal sosial bangsa menuju puncak peradabannya. Pendidikan dan kebudayaan merupakan sebuah kesatuan, pendidikan bersifat progresif, agar adaptif terhadap perkembangan kebudayaan, karena pendidikan merupakan wahana menyosialisasikan sekaligus menjadi cerminan dari nilai-nilai kebudayaan bangsa (Normina, 2017, hlm. 27).

Dijelaskan melalui Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020) bahwa salah satu bentuk pembelajaran dari kampus merdeka adalah magang, sehingga perlu dianalisis secara komprehensif dan direfleksikan atau diberikan indikator yang jelas, agar pembelajaran magang tidak menjadi masalah konseptual pendidikan suatu saat nanti. Liberalisasi pendidikan, apabila tidak dikelola secara bijaksana, tentu berdampak pada lahirnya tenaga kerja yang murah, biayanya pendidikannya mahal, serta cenderung untuk dikorupsi (Shivshenker, 2018, hlm. 22). Pentingnya menjaga muruah pendidikan agar tidak mengalami kesalahan substansi, tentu pendidikan perlu dijauhkan dari praktik-praktik yang tidak manusiawi, seperti korupsi, yang pada konsep liberalisasi pendidikan sangat mungkin terjadi, karena kampus menjadi ladang bisnis, apabila pemangku kebijakannya tidak dilandasi oleh integritas serta moralitas, selain cenderung korupsi, mahalnya biaya pendidikan, serta hasilnya menjadi mayoritas tenaga kerja yang murah menjadi problematik tersendiri, akibat dari liberalisasi pendidikan, apabila tidak dikelola secara arif dan bijaksana. Idealnya liberalisasi pendidikan tinggi, memeluas kesempatan bagi generasi muda untuk mengenyam bangku perkuliahan, karena bersifat demokratis, bukan mempersempit peluang mahasiswa, dengan memberlakukan tarif pendidikan yang tinggi.

Secara normatif, kebijakan kampus merdeka, begitu lemah pengaruh dari aliran filsafat pendidikan perenialismenya, karena pada substansinya, filsafat pendidikan tersebut, merupakan respons atas lahirnya aliran filsafat pendidikan progresivisme. Pada tataran orientasinya, kedua aliran tersebut begitu berbanding terbalik, progresivisme menghendaki kemajuan atau progres

sedangkan perenialisme menghendaki kemunduran atau regres, karena meyakini nilai-nilai dan kebudayaan pada zaman kuno dan abab pertengahan, telah teruji kebenarannya dan harus diajarkan kepada peserta didik. Kooli, dkk (2019, hlm. 38) menjelaskan pembelajaran perenialisme berfokus pada nilai-nilai dan pengetahuan yang ada dimasyarakat, guru memiliki peran lebih dalam aliran perenialisme, sebagai pemberi keteladanan, aliran perenialisme bersifat tradisional karena tidak memfokuskan atau merekomendasikan praksis pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Idealnya filsafat pendidikan perenialisme menjadi refleksi akademik, agar pelaksanaan pendidikan tinggi Indonesia yang mengarah pada liberalisasi memiliki batasan jelas, agar tidak menimbulkan dampak negatif dari liberalisasi pendidikan tinggi.

Ditegaskan oleh Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020) bahwa setiap perguruan tinggi memiliki otonomi dalam menyusun kurikulum yang adaptif terhadap kebijakan kampus merdeka. Sehingga orientasi kurikulumnya memiliki relevansi dengan tujuan kebijakan kampus merdeka, yang berfokus pada penguasaan berbagai disiplin ilmu, berbagai keterampilan, sikap sosial dan kepribadian. Realitas kurikulum tersebut secara normatif belum menjadi landasan atau argumentasi, mengenai kuatnya pengaruh perenialisme terhadap konsep kampus merdeka, karena orientasi, strategi dan praksis pembelajarannya, kurang merepresentasikan aliran filsafat pendidikan perenialisme, terkecuali orientasi dalam membentuk kepribadian mahasiswa, karena masih bisa dikategorikan sebagai pengaruh dari perenialisme, walau tidak bersifat mayoritas. Kurikulum filsafat pendidikan perenialisme didasarkan pada nilai-nilai dan tradisi yang kuat sejak zaman dulu, agar menjadi modal sosial bagi peserta didik untuk mentransformasikan kehidupan masyarakat, kurikulum perenialisme memandang pendidikan harus menjadi sumber perubahan, bukan adaptif terhadap perubahan (Park dalam Kaderi, 2017, hlm. 64).

Tujuan filsafat pendidikan perenialisme yang berupaya untuk memberikan kebenaran yang paling hakiki kepada peserta didik serta mentransformasikan akhlak mulia, tentu berdampak pada bentuk pembelajarannya. Muttaqin (2019, hlm. 87) menjelaskan perenialisme membantu peserta didik mengetahui dan turut mengimplementasikan kebenaran hakiki, sehingga strateginya adalah melatih intelektualitas mentalitas dan disiplin mereka, kurikulumnya berbasis pada nilai dan materi (*content based subject-centered*) yang berfokus pada pembelajaran, seperti: sastra, matematika, bahasa, humaniora, sejarah dan lain-lain. Apabila dibandingkan dengan orientasi dari kebijakan kampus merdeka, yang diejawantahkan melalui Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020) bahwa tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk memperbaiki kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, sehingga relevan dengan kemajuan zaman, bahkan mempersiapkan pemimpin bangsa yang berkompeten dan berkepribadian pada masa yang akan datang. Nyatanya memiliki perbedaan pandangan, baik pada ranah substansi maupun orientasinya, tetapi orientasi eksplisit pembentukan kepribadian, tentu masih bisa dikategorikan sebagai orientasi eksplisit dari filsafat pendidikan perenialisme.

Kampus merdeka yang menghendaki modernisasi pendidikan yang mengarah pada beragamnya bentuk pembelajaran, tentu bukan menjadi prinsip utama pembelajaran perenialisme, karena sifatnya yang konservatif. Karena aliran filsafat pendidikan tersebut, menjadikan pendidik, sebagai dinamisor pendidikan, karena berupaya untuk memberikan keteladanan dan membantu

kepada peserta didik atau mahasiswa menemukan kebenaran yang paling bijaksana. Sehingga mereka bisa meniru atau memaknai keteladanan tersebut, agar menjadi sikap yang diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari dan memiliki pengetahuan yang komprehensif. Peran guru pada aliran perenialisme lebih dominan, sehingga seorang guru idelanya memiliki kapasitas keilmuan dan keteladanan yang baik, karena bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menyimpulkan kebenaran yang paling tepat (Sulaiman, 2013, hlm. 17).

Perenialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang berfokus pada upaya membentuk kepribadian dan kecerdasan peserta didik atau mahasiswa. Walau tidak memiliki andil besar secara normatif dalam menyusun konsep kampus merdeka, faktanya aliran tersebut, secara tidak langsung memberikan rasionalisasi logis, mengenai pentingnya menjadikan nilai-nilai dan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sebagai identitas dan orientasi pendidikan bangsa. Sebagai upaya dalam menjaga muruah Indonesia sebagai bangsa yang memegang teguh Pancasila dan UUD, termasuk pada landasan filsafat, kebijakan dan praksis pendidikan bangsa. Perenialisme juga memberikan refleksi agar kebijakan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi, agar memiliki batasan jelas, guna meminimalisir timbulnya dampak negatif dari diberlakukannya liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia.

Kesimpulan

Kebijakan kampus merdeka begitu merepresentasikan filsafat pendidikan progresivisme, dengan rasionalisasi adaptif terhadap realitas kemajuan zaman, sehingga timbulnya modernisasi serta demokratisasi pada bidang pendidikan tinggi. Bentuk pembelajarannya yang beragam, tentu menjadi peluang dalam mengoptimalkan minat dan bakat mahasiswa, sehingga menjadi modal akademik dan sosialnya untuk berkarier kelak nanti, khususnya pada bentuk pembelajaran magang perlu dianalisis secara komprehensif dan direfleksikan, atau diberikan indikator yang jelas, agar tidak menimbulkan tenaga kerja yang murah, serta meminimalisir ketimpangan antara cita-cita dari tujuan pendidikan nasional dengan realitasnya. Kampus merdeka memiliki orientasi utama untuk mengasah berbagai keterampilan mahasiswa, menguasai berbagai pengetahuan dan disiplin ilmu, peka terhadap berbagai masalah sosial yang terjadi dan membentuk kepribadian mahasiswa. Tentu kebijakan tersebut perlu didukung secara bersama, agar tujuannya bisa tercapai secara efektif dan akurat, sehingga secara cepat mampu mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter, berdaya saing dan unggul, karena filsafat pendidikan progresivisme, pada praksisnya melibatkan berbagai pihak serta mengutamakan adanya kemerdekaan atau keleluasaan dalam pendidikan dan pembelajaran guna mencapai orientasinya.

Dalam konteks aliran filsafat pendidikan perenialisme, kebijakan kampus merdeka, secara garis besarnya, tidak merepresentasikan aliran filsafat tersebut, dengan rasionalisasi, memiliki perbedaan yang cukup besar, baik secara orientasi, strategi, maupun praksis dari pendidikan dan pembelajarannya. Bukan tanpa sebab, aliran filsafat perenialisme memiliki tujuan utama, yaitu mengantarkan peserta didik atau mahasiswa menuju kebenaran yang hakiki, sehingga berdampak pada kepribadian dan kecerdasannya, ciri khas pendidikannya yang cenderung tradisional atau konservatif, menjadi faktor pendukung, bahwa pada dasarnya kebijakan kampus merdeka, tidak

menjadikan aliran filsafat pendidikan perenialisme sebagai landasan utamanya. Tetapi filsafat pendidikan tersebut, mampu menjadi refleksi akademik, agar kampus merdeka, baik secara konsep maupun praksis, terhindar dari dampak negatif liberalisasi pendidikan, yang mampu mengganggu pelayanan optimal kepada mahasiswa serta tidak terpenuhinya hak-hak mereka. Walau tidak menjadi landasan utama dalam menyusun konsep kampus merdeka, tetapi orientasi eksplisit untuk membentuk kepribadian mahasiswa, setidaknya merupakan salah satu orientasi utama dari filsafat pendidikan perenialisme, sehingga menegaskan pentingnya menjaga identitas nasional bangsa dalam konsep, kebijakan dan praksis dari pendidikan, termasuk pada era modernisasi.

Daftar Pustaka

- Abdullah. (2017). Pendekatan dan Model Pembelajaran yang Mengaktifkan Siswa. *Edureligia*. 1 (1). 45-62.
- Biah. (2014). Kombinasi Kecerdasan Intelektual dan Kecerdasan Spiritual dalam Pendidikan Era Global. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. 12 (2). Hlm. 38-51.
- Bhowmick, D. R. (2016). Impact of Liberalization and Globalization on Higher Education in North-East India. *Papirex-Indian Journal of Research*. 5 (8). Hlm. 85-87.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Faris, F. A. (2015). Kurikulum 2013 dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Progressivisme. *Jurnal Filsafat*. 25 (2). Hlm. 317-338.
- Habsari, N. T. (2013). Implementasi Filsafat Perenialisme dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*. 3 (1). Hlm. 149-159.
- Ibrahim, R. (2018). Filsafat Progresivisme Perkembangan Peserta Didik. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*. 10 (1). Hlm. 151-166.
- Kaderi, M. A. (2017). Perenialisme di Era Globalisasi. *Jurnal Tarbiyah (Jurnal Ilmiah Kependidikan)*. 6 (1). Hlm. 59-74.
- Kooli, C. Zidi, C. & Jamrah, A. (2019). The Philosophy of Education in the Sultanate of Oman: Between Perennialism and Progressivism. *American Journal of Education and Learning*. 4 (1). Hlm. 36-49.
- Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep “Merdeka Belajar” Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*. 3 (1). Hlm. 141-147.
- Muttaqin, A. (2016). Implikasi Aliran Filsafat Pendidikan dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam. *Dinamika*. 1 (1). Hlm. 67-92.
- Nabaasa, G. L. (2019). Liberalisation of University Education and the Quality of Teaching Approaches: A Perspective of Public and Private University Education in Eastern Uganda. *International Journal of Education and Research*. 7 (8). Hlm. 105-118.
- Nainggolan, O. R. (2017). Kepentingan Indonesia Bekerjasama dengan Jepang dalam Bidang Pertahanan Tahun 2015. *JOM FISIP*. 4 (2). Hlm. 1-14.
- Nanggala, A. & Suryadi, K. (2020). Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen*. 9 (2). Hlm. 10-23
- Normina. (2017). Pendidikan dalam Kebudayaan. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*. 15 (28). Hlm. 17-28.
- Nuryamin. (2019). Implementasi Filsafat Perenial dalam Pembelajaran. *Jurnal Ilmu Aqidah*. 5 (1). Hlm. 50-61.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Prahani, B. K. Deta, U. A. Yasir, M. Astutik, S. Pandiangan, P. Mahtari, S. Mubarak, H. (2020). The Concept of "Kampus Merdeka" in Accordance with Freire's Critical Pedagogy. *Studies in Philosophy of Science and Education (SiPoSE)*. 1 (1). Hlm. 21-37.
- Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (2019). *Statistik Pendidikan Tinggi 2019*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Ramadhan, I. C. Priyono, J. Trihastuti, N. (2019). Penyelenggaraan Perdagangan Jasa Perguruan Tinggi Asing di Indonesia dalam Perspektif *General Agreement on Trades in Services (GATS)*. *Diponegoro Law Journal*. 8 (1). Hlm. 417-432.
- Shivshenker. (2018). Impact of Liberalization and Globalization on Higher Education. *International Journal of Scientific Research*. 7 (5). Hlm. 21-23.
- Siregar, R. L. (2016). Teori Belajar Perennialisme. *Jurnal Al-hikmah*. 13 (2). Hlm. 172-183.
- Sulaiman. (2013). Pendidikan Versi Aliran Filsafat Perennialisme. *Serambi Tarbawi: Jurnal Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam*. 1 (1). Hlm. 179-194.
- Taylor, I. (2016). Globalization of Higher Education in Malaysia. *Georgia Journal of Collage Student Affairs*. 32 (1). Hlm. 21-25.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Wahid, A. (2010). Pembatalan UU BHP dan Pendidikan Berbasis Humanistik. *Jurnal Konstitusi*. 7 (2). Hlm. 140-158.
- Wulandari, T. (2020). Teori Progresivisme John Dewey dan Pendidikan Partisipatif dalam Pendidikan Islam. *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*. 5 (1). Hlm. 72-86.